



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAKARTA RAYA



LAPORAN KINERJA

tahun 2025

**PERWAKILAN OMBUDSMAN RI
JAKARTA RAYA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sepanjang Tahun 2025, Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya melaksanakan pengawasan pelayanan publik di wilayah DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Dalam aspek penyelesaian laporan masyarakat, realisasi kinerja mencapai 333 laporan atau sebesar 137,60% dari target yang ditetapkan, sehingga melampaui target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan efektivitas manajemen perkara dan optimalisasi proses pemeriksaan.

Dalam aspek pencegahan maladministrasi, indikator penerbitan saran perbaikan kebijakan, pengembangan focal point, serta pembentukan kelompok masyarakat peduli maladministrasi terealisasi 100%. Sementara itu, indikator penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terealisasi sebesar 50% akibat penyesuaian kebijakan anggaran yang berdampak pada ruang lingkup pelaksanaan kegiatan. Setelah adanya perubahan PK pada bulan Desember realisasi penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terealisasi sebesar 100%,

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi mencapai 96,91% dari pagu efektif, yang mencerminkan pengelolaan anggaran secara efisien dan akuntabel di tengah kebijakan efisiensi nasional.

Laporan ini memuat capaian indikator kinerja, analisis atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran Tahun 2025. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kerja Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya-2025

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat, investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS), pencegahan maladministrasi, serta dukungan manajemen kelembagaan.

Kantor Saat Ini	Status Tutup				Grand Total
	Laporan dicabut di PVL	Tutup Materiil	Laporan Tutup Riksa	Laporan Tutup Resmon	
Ombudsman RI (Pusat)	2	281	463	50	796
Maluku		20	709		729
Sumatera Barat		95	264		359
Jakarta Raya	3	50	280		333
Kalimantan Selatan		30	247		277
DI Yogyakarta	2	74	220		296
Jawa Tengah		113	178		291
Riau	1	61	222		284
Kalimantan Barat		75	197		272
Bali		17	252		269
Banten	4	62	196		262
Sumatera Utara		79	182		261
Jawa Timur	5	106	150		261
Sumatera Selatan	4	20	232		256
Kep. Bangka Belitung	4	44	208		256
Sulawesi Barat			236		236
Sulawesi Selatan	7	67	156		230
Sulawesi Utara	1	54	165		220
Kalimantan Timur	3	52	163		218
Lampung	2	19	193		214
Maluku Utara	1	64	148		213
Kepulauan Riau	4	34	175		213
Bengkulu		50	162		212
NTB	1	87	122		210
Jambi	7	4	194		205
Sulawesi Tenggara		33	171		204
Papua Barat	3	2	198		203
Sulawesi Tengah		8	190		198
Gorontalo	1	44	128		173
Kalimantan Tengah	1	16	154		171
NTT	8	122	39		169
Aceh		60	99		159
Jawa Barat	2	51	68		121
Kalimantan Utara		8	76		84
Papua	1	25	49		75
Grand Total	67	1.947	6.886	50	8.950

Gambar 1. Data Dashboard Laporan Tutup Kantor Perwakilan Jakarta Raya Tahun 2025

Pada Tahun 2025, kinerja penyelesaian laporan menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target 254 laporan, realisasi mencapai 333 laporan atau sebesar 137,60%. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan dan mencerminkan optimalisasi manajemen perkara, percepatan proses pemeriksaan, serta penguatan koordinasi internal antar unit kerja.

Dalam aspek pencegahan maladministrasi, indikator penerbitan saran perbaikan kebijakan, pengembangan focal point pengawasan pelayanan publik, pelaksanaan IAPS, serta pembentukan kelompok masyarakat peduli maladministrasi terealisasi 100%. Adapun indikator Jumlah Pemerintah Daerah yang Dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada awalnya ditetapkan sebanyak 12 Pemerintah Daerah. Namun berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja pada Desember 2025 sebagai dampak kebijakan pemblokiran anggaran, target tersebut disesuaikan menjadi 6 Pemerintah Daerah. Dengan realisasi sebanyak 6 Pemerintah Daerah, maka capaian indikator ini dinyatakan 100% sesuai dengan Perjanjian Kinerja hasil revisi.

Penyesuaian target tersebut merupakan konsekuensi kebijakan pembukaan blokir anggaran yang terbatas, sehingga ruang lingkup pelaksanaan kegiatan diselaraskan dengan pagu efektif yang tersedia.

Alokasi Anggaran 2025	
Rp 1,066,988,000 (Riil)	
Rp 434,090,775 (Blokir)	
Rp 632,897,225 (Efektif)	
Realisasi thd pagu efektif	% Capaian
Rp 613,313,250	97%

Program Dukungan Manajemen	
96,76%	
Pagu	383.679.000
Realisasi	328.449.400

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
97,07%	
Pagu	683.309.000
Realisasi	284.863.850

Gambar 2. Realisasi anggaran tahun 2025 Perwakilan Jakarta Raya

Dari sisi anggaran, total alokasi awal Tahun 2025 sebesar Rp1.066.988.000. Namun terdapat blokir anggaran sebesar Rp434.090.775, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi Rp632.897.225. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp613.313.250 atau 97% dari pagu efektif, dengan sisa anggaran sebesar Rp19.583.975. Tingkat penyerapan ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel di tengah kebijakan efisiensi nasional.

Secara keseluruhan, Laporan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja di tengah dinamika kebijakan anggaran nasional, serta tetap berkomitmen mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan bebas dari maladministrasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB.I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ombudsman RI.....	7
a. Fungsi Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya	7
b. Tugas Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya.....	7
c. Wewenang Ombudsman RI.....	8
1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	8
BAB.II RENCANA KERJA	11
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Januari)	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Desember).....	12
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Analisis Kinerja	14
3.2. Capaian Kinerja	16
a. Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	16
b. Penguatan Pencegahan Maladministrasi.....	16
c. Dukungan Manajemen Kelembagaan	16
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	17
BAB.IV PENUTUP	21
LAMPIRAN.....	22

BAB.I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya merupakan perpanjangan tangan Ombudsman RI yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta daerah penyangga yang meliputi Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan berwenang menerima dan memeriksa laporan masyarakat, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS), menerbitkan saran perbaikan kebijakan, serta melaksanakan pengawasan berbasis pencegahan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya menetapkan tiga sasaran strategis, yaitu: (1) terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif; (2) terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik; dan (3) terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat. Sasaran tersebut dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang terukur, antara lain penyelesaian laporan masyarakat, pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri, penerbitan saran kebijakan, pembentukan kelompok masyarakat, serta penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, Tahun 2025 dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada penyesuaian pagu efektif serta revisi Perjanjian Kinerja pada akhir tahun. Penyesuaian tersebut memengaruhi ruang lingkup pelaksanaan beberapa kegiatan, khususnya pada program pencegahan maladministrasi dan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selain itu, dinamika wilayah metropolitan Jakarta Raya dengan kompleksitas laporan masyarakat yang tinggi menjadi tantangan dalam menjaga kualitas, ketepatan waktu, dan akuntabilitas penyelesaian laporan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 menjadi instrumen evaluasi atas capaian target Perjanjian Kinerja hasil revisi serta sebagai dasar perbaikan dan penguatan strategi pengawasan pelayanan publik pada tahun berikutnya.

1.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ombudsman RI

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya merupakan unit kerja Ombudsman RI yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Sebagai perpanjangan tangan Ombudsman RI, pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Ombudsman RI secara nasional.

a. Fungsi Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya

Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD, badan hukum milik negara/daerah, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.

b. Tugas Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya

Tugas Ombudsman Republik Indonesia pada pasal 7 BAB IV Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah:

1. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan
3. Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan
6. Membangun jaringan kerja
7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

c. Wewenang Ombudsman RI

Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:

- 1) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- 2) memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- 3) meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- 4) melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- 5) menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- 6) membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- 7) demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi

1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam hal sumber daya manusia Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya terdiri atas Kepala Perwakilan, PNS, Asisten dan Tenaga Pendukung yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Alokasi SDM Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Perwakilan	1
2.	PNS	2
3.	Tenaga Pendukung	5
	a. Tenaga Kebersihan	1
	b. Pramubakti	3
	c. Driver	1
4.	Keasistenan	17
	a. Keasistenan PVL	
	i. Kepala Keasistenan PVL	1
	ii. Asisten PVL	3

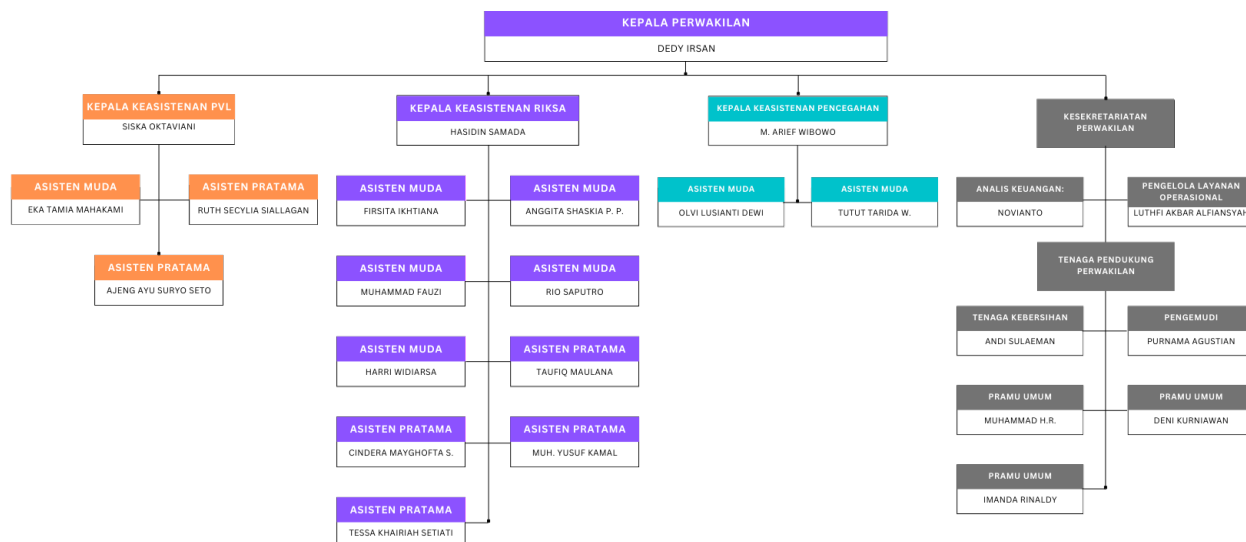
b. Keasistenan Riksa		
i.	Kepala Riksa	1
ii.	Asisten Riksa	9
c. Keasistenan Pencegahan Maladministrasi		
i.	Kepala Pencegahan Maladministrasi	1
ii.	Asisten Pencegahan Maladministrasi	2
Total		25

Sesuai dengan SOTK Perwakilan Ombudsman RI Nomor 011.1-34 Tahun 2025 dalam hal sumber daya manusia Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya terlampir dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.SOTK Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya 2025

Kepala Perwakilan	:	Dedy Irsan
A. Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan		
Kepala Keasistenan	:	Siska Oktaviani
	:	1. Eka Tamia Mahakami 2. Ruth Secylia Siallagan 3. Ajeng Ayu Surya Seto
B. Keasistenan Pemeriksaan Laporan		
Kepala Keasistenan	:	Hasidin Samada
Anggota	:	1. Firsita Ikhtiana 2. Anggita Shaskia Permata P. 3. Muhammad Fauzi 4. Rio Saputro 5. Muhammad Yusuf kamal 6. Tessa Khairiah Setiati 7. Cindera Mayghofta S. 8. Taufiq Maulana I. 9. Hari Widiarsa
C. Keasistenan Pencegahan		
Kepala Keasistenan	:	Moch. Arief Wibowo
Anggota	:	1. Olvi Lusianti Dewi 2. Tutut Tarida Widyaningrum
D. Kesekretariatan		
Analisis Keuangan APBN	:	Novianto

Pengelola Layanan Operasional	:	Luthfi Akbar Alfiansyah
Tenaga Pendukung/Staf	:	1. Deni Kurniawan 2. Muhammad HR 3. Purnama Agustian 4. Andi Sulaeman 5. Imanda Rinaldi



Gambar 4. Struktur Organisasi Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya 2025

Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya terdiri dari 4 unit kerja sebagai berikut:

1. Keasistenan Pengaduan Masyarakat (Dumas), memiliki tugas menerima konsultasi maupun laporan masuk serta melakukan verifikasi syarat formil dan materivl laporan.
2. Keasistenan Penyelesaian Laporan (PL), bertugas melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan Masyarakat yang bertujuan untuk menentukan ada tidaknya Maladministrasi yang dilakukan oleh Terlapor penyelenggara layanan untuk kemudian diberikan tindakan korektif jika ditemukan adanya Maladministrasi.
3. Keasistenan Pencegahan Maladministrasi (PC), bertugas melakukan deteksi dan analisis untuk menemukan potensi Maladministrasi pelayanan publik agar tidak terjadi atau terulang kembali. Kegiatan yang dilakukan meliputi *Rapid Assessment*, *Systemic Review*, dan Survei.
4. Sekretariat Perwakilan, bertugas memberikan dukungan manajemen dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Keasistenan seperti keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, dan lain-lain.

BAB.II RENCANA KERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Januari)

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen antara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya dengan Ketua Ombudsman RI yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi dasar pengukuran kinerja dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Tahun 2025, Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya menetapkan tiga sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3. Revisi Sasaran Perjanjian Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah Focal Point Pengawasan Pelayanan Publik yang Dikembangkan oleh Perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	242 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah Daerah yang Dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	12 Pemerintah Daerah
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket

Tabel 4. Sasaran Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya 2025

KRO/RO/KOMPONEN		PAGU EFEKTIF
Program Pengawasan Penyelenggaraan pelayanan Publik		
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat		
Output 1: Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	Rp	24.180.000
Output 2: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp	372.779.000
Output 3: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp	35.330.000
Pencegahan Maladministrasi		
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp	51.690.000
Output 2: Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp	24.050.000
Output 3: Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp	165.280.000
Program Dukungan Manajemen		
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan		
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp	370.027.000
Output 2: Layanan Sarana Internal	Rp	10.000.000
Total	Rp	1.053.336.000

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Desember)

Dalam perjalanannya, pada bulan Desember 2025 dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja sebagai tindak lanjut atas penyesuaian kebijakan anggaran nasional. Revisi tersebut menyesuaikan beberapa target indikator agar selaras dengan pagu efektif yang tersedia. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja hasil revisi Desember 2025. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 hasil revisi tersebut, Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya menetapkan tiga sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 5. Revisi Sasaran Perjanjian Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	Jumlah Focal Point Pengawasan Pelayanan Publik yang Dikembangkan oleh Perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	254 Laporan

yang Efektif	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah Daerah yang Dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	6 Pemerintah Daerah
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket

Tabel 6.Revisi Sasaran Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya

KRO/RO/KOMPONEN		PAGU EFEKTIF
Program Pengawasan Penyelenggaraan pelayanan Publik		
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat		
Output 1: Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	Rp	10.179.780
Output 2: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp	156.939.959
Output 3: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp	14.873.930
Pencegahan Maladministrasi		
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp	21.761.490
Output 2: Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp	10.125.050
Output 3: Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp	79.582.880
Program Dukungan Manajemen		
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan		
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp	327.434.136
Output 2: Layanan Sarana Internal	Rp	12.000.000
Total	Rp	632.897.225

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 hasil revisi Desember 2025. Berikut matriks capaian kinerja Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Tahun 2025:

Tabel 5. Indikator Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	REALISASI TRIWULAN IV	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah Focal Point Pengawasan Pelayanan Publik yang Dikembangkan oleh Perwakilan	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	254 Laporan	333 Laporan	137,60%	
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan	100%	Terselesaikannya monitoring perlakuan saran pada Kajian 2023

Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100%	
	Jumlah Pemerintah Daerah yang Dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	6 Pemerintah Daerah	6 Pemerintah Daerah	100%	adanya pengurangan Pemerintah Daerah akibat pembukaan blokir hanya 42%, sehingga target menjadi hanya 6 (enam) Pemerintah Daerah. Terdapat informasi akan dilakukan penyesuaian target oleh Ombudsman RI (Kantor Pusat)
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 layanan	100%	pagu efektif sebesar Rp327.434.136, telah direalisasikan sebesar Rp316.469.400 atau 96,65%,
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	1 Paket	100 %	pagu efektif sebesar Rp12.000.000, telah direalisasikan sebesar Rp11.980.000 atau 99,83%

3.2. Capaian Kinerja

a. Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat

Realisasi penyelesaian laporan mencapai 333 laporan atau 137,60% dari target 242 laporan (pk januari) dan target 254 (pk desember). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan tersebut didukung oleh:

- 1) Optimalisasi manajemen perkara dan monitoring berkala terhadap laporan aktif;
- 2) Percepatan proses pemeriksaan melalui klarifikasi tertulis dan pertemuan langsung;
- 3) Penguatan koordinasi antar keasistenan;
- 4) Penyelesaian backlog laporan tahun sebelumnya.

Selain itu, pelaksanaan 1 IAPS dan pengembangan 1 focal point turut memperkuat fungsi pengawasan aktif dan jejaring pengawasan pelayanan publik.

b. Penguatan Pencegahan Maladministrasi

Seluruh indikator pencegahan terealisasi 100% berdasarkan PK hasil revisi Desember 2025. Upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Penyusunan dan penerbitan saran perbaikan kebijakan melalui kajian;
- 2) Monitoring pelaksanaan saran tahun sebelumnya;
- 3) Pembentukan kelompok masyarakat peduli maladministrasi bersama Forum Anak dan Forum Genre;
- 4) Pelaksanaan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap 6 Pemerintah Daerah sesuai target revisi.

Revisi target jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai dilakukan akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada pembukaan blokir sebesar 42%, sehingga ruang lingkup kegiatan disesuaikan dengan pagu efektif.

c. Dukungan Manajemen Kelembagaan

Indikator dukungan manajemen juga tercapai 100%. Kegiatan yang mendukung capaian tersebut meliputi:

- 1) Pelaksanaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor secara optimal;
- 2) Pengadaan 1 paket Barang Milik Negara berupa laptop untuk mendukung kinerja Asisten;
- 3) Pengelolaan anggaran yang efisien dengan realisasi sebesar 96,91% dari pagu efektif.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Analisis efisiensi dilakukan untuk melihat keterkaitan antara capaian kinerja dengan penggunaan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia selama Tahun 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, total alokasi awal anggaran sebesar Rp1.066.988.000. Namun terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp434.090.775 sehingga pagu efektif menjadi Rp 632.897.225. Hingga akhir tahun, realisasi anggaran mencapai Rp 613.313.250 atau 96,91% dari pagu efektif.

Meskipun pagu efektif mengalami penyesuaian signifikan akibat kebijakan efisiensi nasional, seluruh indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja hasil revisi Desember 2025 tetap tercapai 100%, bahkan indikator penyelesaian laporan melampaui target dengan capaian 137,60%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Efisiensi tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Prioritisasi kegiatan berdasarkan urgensi dan dampak terhadap capaian indikator kinerja;
- b. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia melalui pembagian beban kerja yang terstruktur;
- c. Pemanfaatan metode pemeriksaan yang lebih efektif, termasuk klarifikasi tertulis dan koordinasi daring;
- d. Penyelesaian backlog laporan tahun sebelumnya secara bertahap.

Dengan keterbatasan pagu efektif, Perwakilan tetap mampu menjaga kualitas output dan memenuhi target kinerja, yang menunjukkan tingkat efisiensi yang baik antara input (anggaran) dan output (capaian kinerja).

Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel 15. Rincian Anggaran Tahun 2025 Perwakilan Jakarta Raya

Alokasi Anggaran 2025	
Rp 1,066,988,000 (Riil)	
Rp 434,090,775 (Blokir)	
Rp 632,897,225 (Efektif)	
Realisasi thd pagu efektif	% Capaian
Rp 613,313,250	97%

**Program Dukungan
Manajemen**
96,76%

Pagu	383.679.000
Realisasi	328.449.400

**Program Pengawasan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik**
97,07%

Pagu	683.309.000
Realisasi	284.863.850

Rincian Realisasi Sesuai dengan Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja

Tabel 16.Rincian Program Anggaran Tahun 2025 Perwakilan Jakarta Raya

KRO/RO/KOMPONEN		PAGU EFEKTIF	REALISASI	%
Program Pengawasan Penyelenggaraan pelayanan Publik				
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat				
Output 1: Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	Rp	10.179.780	10.179.780	
Output 2: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp	156.939.959	156.939.959	
Output 3: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp	14.873.930	14.873.930	
Pencegahan Maladministrasi				
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp	21.761.490	21.761.490	
Output 2: Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp	10.125.050	10.125.050	
Output 3: Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp	79.582.880	79.582.880	
Program Dukungan Manajemen				
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan				
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp	327.434.136		
Output 2: Layanan Sarana Internal	Rp	12.000.000		
Total	Rp	632.897.225		

a. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Program ini mendukung pencapaian sasaran penyelesaian laporan masyarakat dan penguatan pencegahan maladministrasi.

- Pagu efektif program: Rp 293.463.089
- Realisasi: Rp 284.863.850
- Persentase realisasi: 97,07%

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan program utama dalam mendukung pencapaian sasaran penyelesaian laporan masyarakat dan penguatan pencegahan maladministrasi. Pada Tahun Anggaran 2025, setelah penyesuaian akibat kebijakan pemblokiran anggaran, pagu efektif program ini sebesar Rp293.463.089. Hingga akhir tahun, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp284.863.850 atau 97,07% dari pagu efektif.

Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat, pelaksanaan 1 (satu) Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), penyusunan dan monitoring saran perbaikan kebijakan, pembentukan kelompok masyarakat peduli maladministrasi, serta pelaksanaan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap 6 (enam) Pemerintah Daerah sesuai Perjanjian Kinerja hasil revisi Desember 2025. Tingkat penyerapan yang tinggi menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah selaras dengan pencapaian indikator kinerja pada program pengawasan.

b. Program Dukungan Manajemen

Program ini mendukung kelancaran operasional dan tata kelola internal perwakilan.

- Pagu efektif program: Rp 327.434.136
- Realisasi: Rp 316.469.400
- Persentase realisasi: 96,65%

Realisasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen digunakan untuk mendukung layanan operasional dan pemeliharaan kantor serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang tugas. Pada Tahun 2025, pengadaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan meliputi 1 (satu) unit monitor 27 inch dan 1 (satu) unit laptop sebagai pengganti perangkat komputer Asisten yang mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan secara optimal. Selain pengadaan BMN tersebut, terdapat pula belanja ekstrakomptabel untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perkantoran, antara lain pembelian tong sampah, meja kerja, rak kayu, Xiaomi Stick TV Android, serta dispenser. Pengadaan tersebut

bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, efektivitas, dan mendukung pelaksanaan kegiatan rapat maupun presentasi di lingkungan Perwakilan. Secara keseluruhan, penggunaan anggaran pada Program Dukungan Manajemen dilaksanakan secara efisien dan proporsional sesuai kebutuhan operasional serta selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja hasil revisi.

BAB.IV PENUTUP

Secara umum, kinerja Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal dan akuntabel. Seluruh indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 hasil revisi Desember telah tercapai 100%, bahkan indikator penyelesaian laporan masyarakat melampaui target dengan capaian 137,60%. Realisasi anggaran sebesar 96,91% dari pagu efektif juga mencerminkan pengelolaan keuangan yang efisien dan selaras dengan pencapaian output kinerja. Meskipun menghadapi dinamika kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada penyesuaian ruang lingkup kegiatan, Perwakilan tetap mampu menjaga kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan pelayanan publik di wilayah kerja.

Ke depan, Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya akan terus memperkuat manajemen perkara untuk menjaga keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penyelesaian laporan, meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis pencegahan melalui kajian dan monitoring kebijakan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemeriksaan dan koordinasi. Selain itu, penguatan jejaring pengawasan melalui focal point dan kelompok masyarakat akan terus dikembangkan guna memperluas partisipasi publik dalam mendorong perbaikan pelayanan publik. Dengan langkah tersebut, diharapkan kinerja Perwakilan pada tahun berikutnya dapat semakin meningkat, adaptif terhadap dinamika kebijakan, serta konsisten dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, adil, dan bebas dari maladministrasi.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Januari 2025

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
JAKARTA RAYA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedy Irsan
Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA RAYA,

Dedy Irsan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
 JAKARTA RAYA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	242 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	12 Pemerintah Daerah
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN	
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat		
Output 1: Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	Rp	24.180.000
Output 2: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp	372.779.000
Output 3: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp	35.330.000
Pencegahan Maladministrasi		
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp	51.690.000
Output 2: Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp	24.050.000
Output 3: Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp	165.280.000
Program Dukungan Manajemen		
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan		
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp	370.027.000
Output 2: Layanan Sarana Internal	Rp	10.000.000
Total	Rp	1.053.336.000

Jakarta, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA RAYA,



Dedy Irsan

Perjanjian Kinerja Revisi Desember 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAKARTA RAYA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	254 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	6 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
A	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat			
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	24.180.000	14.000.220	10.179.780
2	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	372.779.000	215.839.041	156.939.959
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang	35.330.000	20.456.070	14.873.930

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
	Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik			
B Pencegahan Maladministrasi				
1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	51.690.000	29.928.510	21.761.490
2	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	24.050.000	13.924.950	10.125.050
3	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	175.280.000	95.697.120	79.582.880
II Dukungan Manajemen				
A Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan				
1	Layanan Perkantoran	371.679.000	44.244.864	327.434.136
2	Layanan Sarana Internal	12.000.000	0	12.000.000
	Total	1.066.988.000	434.090.775	632.897.225

Jakarta, Desember 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA RAYA,

Mokhammad Najih



Dedy Irsan

Beberapa Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyelesaian Laporan/pengaduan Masyarakat



Kegiatan pencegahan maladministrasi dan penerbitan saran kebijakan; (supervisi , pendampingan dsb)



Kegiatan sosialisasi kelompok masyarakat peduli maladministrasi bersama forum anak jakarta dan forum gendre provinsi dki jakarta



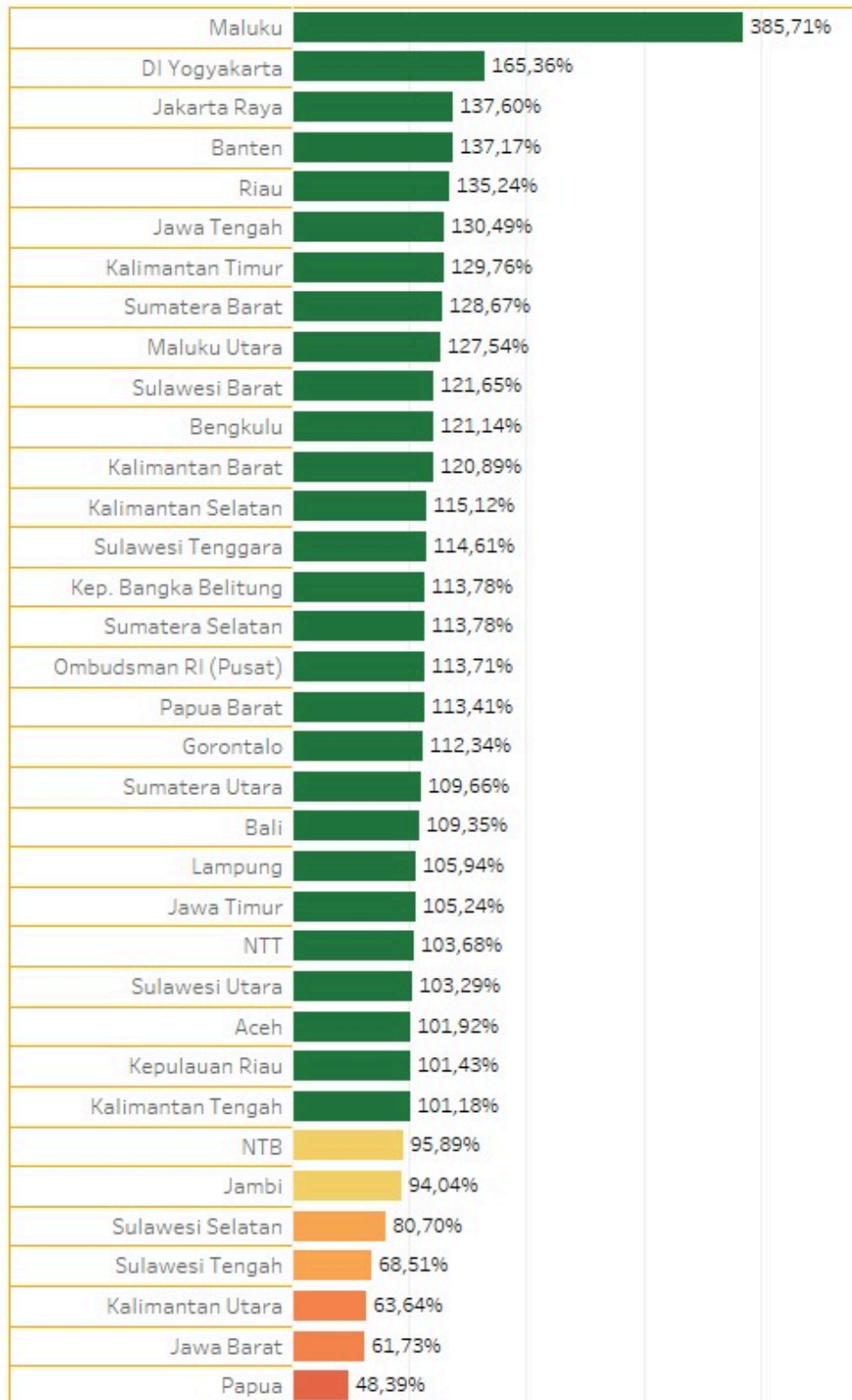
Pelaksanaan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik





Kegiatan Penguatan focal point Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya

Kantor Saat Ini	Status Tutup				Grand Total
	Laporan dicabut di PVL	Tutup Materiil	Laporan Tutup Riksa	Laporan Tutup Resmon	
Ombudsman RI (Pusat)	2	281	463	50	796
Maluku		20	709		729
Sumatera Barat		95	264		359
Jakarta Raya	3	50	280		333
Kalimantan Selatan		50	247		297
DI Yogyakarta	2	74	220		296
Jawa Tengah		113	178		291
Riau	1	61	222		284
Kalimantan Barat		75	197		272
Bali		17	252		269
Banten	4	62	196		262
Sumatera Utara		79	182		261
Jawa Timur	5	106	150		261
Sumatera Selatan	4	20	232		256
Kep. Bangka Belitung	4	44	208		256
Sulawesi Barat			236		236
Sulawesi Selatan	7	67	156		230
Sulawesi Utara	1	54	165		220
Kalimantan Timur	3	52	163		218
Lampung	2	19	193		214
Maluku Utara	1	64	148		213
Kepulauan Riau	4	34	175		213
Bengkulu		50	162		212
NTB	1	87	122		210
Jambi	7	4	194		205
Sulawesi Tenggara		33	171		204
Papua Barat	3	2	198		203
Sulawesi Tengah		8	190		198
Gorontalo	1	44	128		173
Kalimantan Tengah	1	16	154		171
NTT	8	122	39		169
Aceh		60	99		159
Jawa Barat	2	51	68		121
Kalimantan Utara		8	76		84
Papua	1	25	49		75
Grand Total	67	1.947	6.886	50	8.950



Penulisan Artikel di Ombudsman

Ombudsman Jakarta Raya Sukses Selenggarakan Lima Kegiatan Ombudsman On The Spot Sepanjang 2025	11-12-25	https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-ombudsman-jakarta-raja-sukses-selenggarakan-lima-kegiatan-ombudsman-on-the-spot-sepanjang-2025
Menuju Kota Layak Anak 2030, Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Perkuat Partisipasi Anak dalam Pengawasan Pelayanan Publik	18-12-25	https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-menuju-kota-layak-anak-2030-perwakilan-ombudsman-ri-jakarta-raja-perkuat-partisipasi-anak-dalam-pengawasan-pelayanan-publik
Ombudsman Jakarta Raya Terima Audiensi BP3MI, Bahas Penguatan Pengawasan Perlindungan Pekerja Migran	31-12-25	https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-ombudsman-jakarta-raja-terima-audiensi-bp3mi-bahas-penguatan-pengawasan-perlindungan-pekerja-migran